BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Batam, yang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu kota dengan tingkat perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia. Dengan letaknya yang strategis dekat dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan industri. Perkembangan ini didukung dengan berbagai investasi yang diperoleh baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri (domestik) yang mengarah pada peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan perumahan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hunian vertikal (apartemen).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan tersebut, Kota Batam juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Pembangunan perumahan dalam skala besar ataupun masif berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan seperti dengan adanya penurunan kualitas udara, gangguan ekosistem terhadap hewan ataupun satwa yang berada disekitar, serta peningkatan volume limbah dan emisi. Oleh sebab itu, setiap usaha rencana pembangunan perumahan yang mempunyai dampak besar dan penting di Kota Batam diwajibkan untuk melakukan atau melalui tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Proses penyusunan dokumen AMDAL tersebut tentunya melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai aspek lingkungan hidup. Kajian ini meliputi identifikasi potensi dampak lingkungan, pengelolaan dampak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam hal pembangunan perumahan di Kota Batam, penyusunan dokumen AMDAL menjadi lebih kompleks dengan melihat geografis yang berada di wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, proses AMDAL tidak hanya melibatkan analisis yang bersifat teknis, namun juga diperlukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi di Kota Batam beberapa waktu lalu juga dikaitkan dengan isu penggunaan lahan. Beberapa tahun terakhir, terjadi konversi lahan yang signifikan dari hutan atau area hijau menjadi kawasan perumahan, ruko (rumah toko) dan komersial. Fenomena ini, apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih sulit untuk diperbaiki, seperti hilangnya habitat satwa, berkurangnya daerah resapan air, serta meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor. Dengan demikian, AMDAL berfungsi untuk memberikan panduan teknis bagi pengembang agar pembangunan perumahan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, namun juga menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Batam.

Dokumen AMDAL juga berfungsi untuk memitigasi potensi dampak sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan perumahan itu sendiri. Kota Batam, sebagai salah satu wilayah urban yang dikatakan cukup dinamis, memiliki keragaman sosial dan budaya yang perlu untuk diperhatikan dalam setiap aktivitas pembangunan. Dampak sosial yang terjadi seperti perpindahan penduduk, perubahan pola kehidupan masyarakat, dan peningkatan kesenjangan sosial merupakan tantangan yang sering dijumpai dalam proyek berskala besar. Oleh karena itu, dokumen AMDAL wajib menyertakan kajian sosial untuk memastikan bahwa pembangunan yang hendak dilaksanakan tidak merugikan masyarakat sekitar, namun justru memberikan manfaat yang optimal bagi mereka.

Regulasi yang mengatur pelaksanaan AMDAL juga menjadi landasan penting dalam penyusunan dokumen ini. Pemerintah Kota Batam, tentunya bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berada dalam lingkup atau berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh setiap pengembang. Proses AMDAL ini juga mencakup ke beberapa tahapan seperti Penyusunan Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setiap tahapan pastinya memerlukan validasi dan juga persetujuan pihak berwenang sebelum proyek tersebut dilanjutkan.

Terkadang dalam praktiknya pelaksanaan AMDAL di Kota Batam menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dimaksud yakni kurangnya kesadaran pengembang terhadap pentingnya AMDAL, kemudian minimnya data lingkungan

yang akurat, dan juga keterbatasan kapasitas lembaga pengawasan. Di sisi lain, tekanan untuk mempercepat pembangunan terkadang sering kali membuat proses AMDAL dilakukan secara terburu-buru, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memenuhi standar lingkungan hidup yang berlaku.

Permasalahan atau isu terkait pembangunan infrastruktur telah menjadi agenda yang penting. Kota Batam, sebagai salah satu dari bagian wilayah strategi nasional, memiliki tanggung jawab untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Salah satu tujuan dari SDGs yang relevan adalah memastikan antara pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor pembangunan. Oleh sebab itu, pelaksanaan dokumen AMDAL tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi komitmen secara moral maupun strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Batam. Permasalahan terkait lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu Pencemaran lingkungan (*Pollution*), Pemanfaatan lahan secara salah (*Land Misuse*) dan Pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*Natural resource depletion*). Akan tetapi apabila dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan tersebut hanya di kelompokkan menjadi dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*Environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.¹

¹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusunan dokumen RKL/RPL untuk pembangunan perumahan di Kota Batam merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proses ini juga memerlukan kolaborasi yang baik antara pihak instansi pemerintahan, pengembang, masyarakat dan juga ahli lingkungan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan pendekatan yang komprehensif, dokumen RKL/RPL dapat menjadi salah satu dokumen yang efektif untuk mengelola lingkungan dan sosial yang bersamaan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Batam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam?

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan dan dapat menjadi rujukan serta pembaharuan dalam bidang hukum terkait pelaksanaan proyek pembangunan perumahan di Kota Batam dalam melakukan pembangunan perumahan yang sesuai dengan aspek AMDAL.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait pembangunan perumahan yang sesuai dengan aspek hukum AMDAL dan pemanfaatan lingkungan hidup.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini mampu menjadi referensi penulisan ataupun memperdalam terkait regulasi pembangunan perumahan yang sesuai dengan aspek hukum AMDAL dan pemanfaatan lingkungan hidup.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini mampu memberikan referensi dan juga pengetahuan hukum mendalam terkait regulasi pembangunan perumahan sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya apabila terdapat ketidaksesuaian proyek yang menimpa pemukiman masyarakat setempat.

d. Bagi Pemerintah

Khususnya pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan proyek pembangunan perumahan sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang sesuai dengan aspek hukum AMDAL dan pemanfaatan lingkungan hidup.

3. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi hukum dengan judul “Pelaksanaan Dokumen AMDAL Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Batam” merupakan hasil karya asli dari penulis. Sehingga bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Adapun pencarian mengenai skripsi yang sudah ada dan berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri yakni, sebagai berikut:

1. Judul

Pelaksanaan Peran Masyarakat Terkena Dampak Pada Tahap Konsultasi Publik
Dalam Proses AMDAL di Kota Klaten (Studi Kasus Pembangunan Tol
Yogyakarta- Solo)

a. Identitas Penulis

Nama : Claesia Tifany Aulia Putri

NPM : 170512732

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, inti permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo?

c. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini melibatkan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo.

b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak pada konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa peran masyarakat pada proses konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

e. Perbedaan

Berdasarkan skripsi tersebut adanya perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Skripsi yang ditulis Claesia Tifany Aulia Putri memfokuskan pada peran masyarakat dalam proses konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta- Solo di Kabupaten Klaten. Dalam skripsi tersebut penulis memfokuskan pada kurang optimalnya peran masyarakat pada konsultasi publik dalam pembangunan Tol Yogyakarta- Solo tersebut yang disebabkan oleh adanya beberapa kendala, baik dari pihak Pemrakarsa itu sendiri maupun Konsultan AMDAL.

2. Judul

Fungsi AMDAL Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan New Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo

a. Identitas Penulis

Nama : Lian Leavenna

NPM : 150512137

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Menurut uraian di atas, adapun rumusan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah AMDAL berfungsi dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja kendala dalam mewujudkan fungsi AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan terutama akibat dari pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.

2. Untuk mengetahui kendala- kendala serta solusinya dari pelaksanaan AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam skripsi ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwasanya Analisis Mengenai Dampak Akhir Lingkungan yang dilihat secara fungsi memang digunakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang diperkirakan akan timbul. Walaupun dalam pembuatan AMDAL Bandara New Yogyakarta International Airport sendiri sedikit terlambat namun apabila dilihat dari sisi pencegahan kerusakan lingkungan terbukti memenuhi syarat dikarenakan pembangunan YIA lebih berfungsi dalam mengendalikan serta meminimalisir dampak lingkungan akibat pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport.

e. Perbedaan

Berdasarkan skripsi tersebut adanya perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Skripsi yang ditulis oleh Lian Leavena memfokuskan pada studi analisis terkait kerusakan lingkungan akibat pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo. AMDAL dari Bandara New Yogyakarta International Airport sendiri lebih berfungsi dalam mengendalikan

dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Kendala yang dihadapi dalam kasus ini yakni mengenai mobilitas alat dan bahan penunjang yang digunakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang timbul dalam pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport.

3. Judul

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

a. Identitas Penulis

Nama : Nino Augusta Sasongko

NIM : E1A003150

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mempunyai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah ditindaklanjuti melalui beberapa Surat Keputusan Bupati mengenai AMDAL.
2. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap adalah akibat dari pihak yang sudah melaksanakan usaha/kegiatan, menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan pada kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan.

e. Perbedaan

Berdasarkan skripsi tersebut adanya perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Skripsi yang ditulis oleh Nino Augusta Sasongko memfokuskan pada bagaimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan mengetahui hambatan yang terjadi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap yang diakibatkan oleh adanya

pihak yang sudah melaksanakan usaha. kegiatan, menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum. Serta sanksi yang diberikan pada kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan, diantaranya adalah Audit Lingkungan Hidup wajib, akan tetapi hal ini pada kenyataannya dipandang belum cukup efektif untuk menjerat pelaku pelanggaran atas AMDAL, sehingga mengakibatkan pelanggaran serupa terjadi akibat rendahnya efek dari sanksi yang diberikan.

F. Batasan Konsep

1. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan.² Menurut Bruce Mitchell pembangunan yang berdampak pada lingkungan terdiri dari Perubahan, Kompleksitas, Ketidakpastian, dan Konflik.³

2. Perumahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

² Agus. Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. 2010., Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 4.

³ Bruce Mitchell dkk, 2010, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan.*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 1.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁴

4. Dokumen AMDAL

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berisi tetnang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.⁵

5. AMDAL

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPPLH dinyatakan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

6. RKL/RPL

Merujuk pada Pasal 1 angka 17 dan 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan

⁴ Syukur Abdullah, "KumpulanMakalah"Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan",Persadi,Ujung Pandang,hlm 40," 1985.

⁵ "Dokumen Lingkungan – Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam," diakses 12 Desember, 2024, <https://dlh.batam.go.id/dokumen-lingkungan/>.

bahwasanya RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan. Dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.

Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang turut menikmati dampak positif tersebut.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan proses investigasi secara aktif, sistematis untuk

⁶ Muchamad Ja'abik Fatchullah and Aju Putrijanti, "Peranan Konsultan Lingkungan Dalam Pembuatan Dokumen," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm. 1455.

menemukan ataupun menginterpretasikan fakta-fakta sosial serta norma hukum yang berlaku. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara pada responden dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara ataupun observasi terhadap sumber penelitian yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

b. Data sekunder

Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan.
- b) Doktrin, asas-asas hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal mendukung hasil penelitian skripsi ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut:

a) Wawancara

Pengumpulan data wawancara untuk memperoleh data primer dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden yang terkait dalam hal ini adalah Konsultan AMDAL Perumahan Gesya Talenta Tembesi yakni Bapak Samsul Bahri S.Pd., CEIA Selaku Ketua Tim Penyusun AMDAL.

b) Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan materi ataupun objek penelitian. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Proyek Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi di Kota Batam.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan ini dilakukan di Proyek Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi di Kota Batam.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapaun responden dalam penelitian ini adalah Konsultan AMDAL Perumahan Gesya Talenta Tembesi yang diwakili oleh Bapak Samsul Bahri S.Pd., CEIA selaku Konsultan Ketua Tim Penyusun AMDAL.

b. Narasumber adalah subjek yang karena jabatannya, maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang bertujuan melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang diwakili oleh Ibu Dina Iriana, S.T., M.T selaku Fungsional Pengendali Lingkungan Muda di Bidang Tata Lingkungan.